

Community Economic Empowerment Through Community Self-Reliance Agency Capital Programs [Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat]

Silvia Nur Diana¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*.2)}

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to find out how well the loan capital program is running in improving the community's economy through the Community Self-Reliance Agency using a qualitative descriptive method. Data collection in this study was carried out through observation, interviews for primary data collection and documentation. The results showed that the revolving loan program at BKM Maju Makmur, Kajeksan Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency was running well according to the expected goals. The community is very enthusiastic about this revolving loan program because they no longer need to borrow money from installment banks. In its management, the BKM is very transparent and can convince the public that the program provided by the government can work according to its objectives, namely the utilization of the community's economy. The existence of a revolving loan program really helps the community in improving their economy such as providing venture capital. But from the results of the research, there were also a few problems where some people did not want to be responsible for repaying each month. Therefore, in order for the revolving loan at BKM Maju Makmur to continue to run, people who do not want to repay it pay more attention, such as being given sanctions in the form of fines so that it does not have an impact on the people who need the loan. Apart from that, this research can also contribute to carrying out loan revolving to empower the community's economy through the BKM capital program.*

Keywords - BKM, Economy, Community Empowerment

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berjalannya program permodalan pinjaman bergulir dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara untuk pengumpulan data primer serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pinjaman bergulir yang ada di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masyarakat sangat antusias adanya program pinjaman bergulir ini karena mereka tidak lagi membutuhkan pinjaman uang dari bank cicilan. Dalam pengelolaannya pihak BKM sangat transparan dan bisa meyakinkan Masyarakat kalau program yang diberikan oleh pemerintah ini bisa berjalan sesuai tujuan yakni memberdayakan ekonomi Masyarakat. Adanya program pinjaman bergulir sangat membantu Masyarakat dalam meningkatkan pekonomiannya seperti memberikan modal usaha. Tetapi dari hasil penelitian juga ditemui sedikit permasalahan dari Sebagian Masyarakat tidak mau bertanggung jawab untuk mengangsur tiap bulannya. Oleh karena itu, agar pinjaman bergulir di BKM Maju Makmur agar terus berjalan lebih diperhatikan Masyarakat yang tidak mau mengangsur seperti diberikan sanksi berupa denda agar tidak berdampak pada Masyarakat yang membutuhkan pinjaman tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam menjalankan pinjaman bergulir untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat melalui program permodalan BKM.*

Kata Kunci - BKM, Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan selalu menjadi ancaman bagi pemerintah semua negara di dunia dan harus diperangi. Hal ini disebabkan karena kemiskinan suatu negara merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah negara dapat digolongkan maju, berkembang atau terbelakang. Kemiskinan berarti kekurangan harta, serta pendapatan seseorang yang rendah, lebih tepatnya, kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar [1].

Fenomena kemiskinan di Indonesia dapat diartikan sebagai kondisi individu, kelompok dan keluarga yang tidak mampu mencapai taraf hidup yang paling rendah [2]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup tinggi. Mereka akan menjadi bagian dari komunitas pedesaan yang terstruktur dan berbudaya. Oleh karena itu kegiatan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mencakup upaya pemberdayaan untuk memungkinkan mereka mengakses sumber daya keuangan [3].

Kemiskinan yang meluas di Indonesia terkait erat dengan kemiskinan yang mengiringi ketidakmampuan masyarakat. Pada umumnya orang miskin tidak berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan kekuasaan. Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui penguatan pemberdayaan [4]. Pemberdayaan adalah “upaya penyiapan masyarakat untuk melakukan tindakan guna mempererat badan masyarakat sampai dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam iklim keadilan sosial yang berkelanjutan” [5]. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang berfokus pada kewenangan. Pemberdayaan pada dasarnya adalah proses melepaskan (runtuhnya) hubungan antara subjek dan objek. mekanisme Ini tentang membenaran kemampuan atau kekuatan pokok Secara keseluruhan, proses ini penting untuk mentransfer energi dari sumber ke tujuan. Hasil Delegasi berarti pengalihan fungsi individu asli objek menjadi subjek (baru), seperti halnya hubungan sosial maka itu hanya ditandai oleh hubungan sosial antar subjek satu dengan subjek lainnya [6].

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkokoh harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini tidak dapat lepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Sumodiningrat [7], pemberdayaan masyarakat dalam hal ini merupakan upaya untuk menciptakan masyarakat mandiri melalui perwujudan potensi kemampuannya. Pada saat yang sama, pemberdayaan masyarakat melibatkan dua kelompok yang saling berhubungan, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang terkena dampak sebagai pihak yang berpengaruh.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti pemberdayaan Kepemilikan faktor produksi, penguatan kontrol distribusi dan pemasaran agar masyarakat dapat menerima upah yang cukup dan memperkuat masyarakat untuk menerima Informasi, pengetahuan dan keterampilan yang akan diimplementasikan dalam banyak hal, baik dari sudut pandang masyarakat itu sendiri maupun dari sudut pandang politik. Dalam praktiknya, Langkah-langkah untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitar masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitasnya. pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan indikasi perbaikan martabat kelas sosial untuk menghindari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi interior Meningkatkan kemampuan dan kemandirian finansial Masyarakat. Pemberdayaan ekonomi membutuhkan partisipasi dan kreativitas [8].

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan memperluas dan meningkatkan program pembangunan berbasis masyarakat. Seperti pada program P2KP Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau yang menjadi cikal bakal lahirnya PNPM Mandiri Perkotaan atau yang kini menjadi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sesuai dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 terhadap RPJMN 2015-2019 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Permukiman Kumuh Perkotaan (Petunjuk Pelaksanaan Tingkat Kota yaitu KOTAKU, 2016:2). Dalam program KOTAKU, terdapat sebuah wadah yang dapat membuat masyarakat mandiri secara ekonomi, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Cakupan program KOTAKU meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Bidang Ekonomi memiliki program yang disebut “Pinjaman Bergulir” dimana pinjaman ini berasal dari dana pemerintah kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk pengembangan usaha dalam bentuk pinjaman yang diangsur. Pinjaman bergulir ialah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang mengawasi operasional dan memberikan modal kepada masyarakat miskin. dan didukung oleh kelompok Keswadayaan masyarakat (KSM) Sebagai Lembaga masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan,

Salah satu desa di Sidoarjo tetap beroperasi terkait program pinjaman bergulir, yaitu BKM Maju Makmur, Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Modal hibah yang diterima dari Bank Dunia antara tahun 2008-2013 berjumlah Rp. 228.300.000. Banyak orang meminjam uang dari BKM Maju Makmur melalui Skema Pinjaman Siaga (bergulir), Dibuktikan dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Masyarakat Yang Meminjam Uang di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah Peminjam	Jumlah Pencairan	Jumlah Angsuran
2018	251	Rp. 454.000.000	Rp. 696.552.500
2019	197	Rp. 539.000.000	Rp. 643.604.500
2020	175	Rp. 508.000.000	Rp. 606.690.000
2021	162	Rp. 740.800.000	Rp. 554.318.500
2022	169	Rp 589.000.000	Rp. 623.338.500

Sumber: Data diolah penulis dari BKM Maju Makmur 2023

Dari uraian tabel 1, terlihat jelas bahwa BKM Maju Makmur dapat dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Trebukti banyak orang yang meminjam uang ke BKM Maju Makmur. Dengan BKM, masyarakat lebih

diuntungkan adanya program Ekonomi Bergulir, yaitu program peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, mayoritas penduduk desa Kajeksan bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga perlu dilakukan penanggulangan masalah kemiskinan. Dengan bantuan dana bergulir ini, setidaknya masyarakat Desa Kajeksan bisa terbantu kebutuhannya. Karena program ekonomi bergulir tidak hanya digunakan untuk memulai usaha atau mendapatkan modal, tetapi juga digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk biaya sekolah, perbaikan rumah, dll.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan hasil penelitian sebelumnya sebagai pembanding, antara lain: Pertama, Ai Sri Entang, A. Bachrun Rifa'i, dan Ali Azis (2018) mengkaji peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang dapat disimpulkan adalah upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk memperkuat perekonomian masyarakat Desa Sukamaju. Secara khusus pembahasan akan difokuskan pada isu-isu terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam ekonomi bergulir dan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera. Fokus penelitian ini adalah pinjaman bergulir BKM diharapkan mampu memfasilitasi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. [9]

Kedua, penelitian Fardah Nurjanah (2021), tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang dapat diperoleh adalah upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mugi Rahayu desa Sokaraja Lor kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas memiliki program-program untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang ekonomi bergulir, bidang sosial bergulir, dan bidang lingkungan bergulir. Upaya pemberdayaan masyarakat BKM Mugi Rahayu di Desa Sokaraja Lori adalah penguatan sumber daya manusia dan pemberian dana/pinjaman kepada usaha masyarakat melalui program Tridaya BKM. [10].

Ketiga adalah penelitian Syaifuddin Iskandar, Amelya Dinda Asmara Rani dan Heri Kurniawansyah HS (2022) tentang peran BKM dalam Penanggulangan kemiskinan di Desa Labuhan Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah peran BKM Madani dalam penanggulangan kemiskinan di desa Labuhan Sumbawa yang meliputi tiga bidang disebut dengan Tri Daya. Ketiga bidang tersebut adalah lingkungan, sosial dan ekonomi. Program BKM Madani meliputi pemberdayaan, pengelolaan permukiman kumuh, dan bantuan modal pinjaman untuk masyarakat rentan secara ekonomi. Namun, program yang paling banyak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin di bidang ekonomi dan lingkungan adalah pinjaman bergulir dan infrastruktur. [11]

Keempat, penelitian Wulan Riyadi, Latief Z. Nur, Nita Hernita, Melia Wida Rahmayani, dan Eli Achmad Mahiri (2023) tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Cicurug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan UPK produktif berdasarkan fenomena yang terjadi di UPK Kelurahan Cicurug Kabupaten Majalengka Jawa Barat yaitu strategi menghadapi pinjaman yang tidak menguntungkan melalui pelatihan analisis kredit dan memperkuat manajemen organisasi melalui pelatihan organisasi serta mendorong terciptanya tata kelola UPK yang kompetitif karena keberadaannya yakni dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pedesaan. menjadi komunitas Kursus pelatihan manajemen keuangan dan analisis kredit digunakan sebagai metode PKM. Diharapkan kegiatan PKM ini memberikan pemahaman kepada anggota UPK tentang pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan dan membawa perubahan pola pikir sehingga masyarakat dan pimpinan UPK lebih profesional dan mampu memimpin organisasi UPK dengan baik melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. [12]

Pada penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat" penulis menggunakan fokus pada indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kerangka *ACTORS* menurut Abdul Basith 2012 yaitu *Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*. Ke-enam pendekatan ini tentu saja selaras dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, yaitu pembebasan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling, menurut (Sugiono, 2015) dengan menentukan sampel informan sebagai sumber data melalui pertimbangan tertentu. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan Pimpinan Kolektif BKM Desa Kajeksan Kecamatan

Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan program BKM. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara untuk pengumpulan data primer dan dokumentasi. Fokus penelitian yang ditinjau oleh peneliti adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat dengan teori menurut Abdul Basith, 2012 yaitu *Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*. Dalam mengelola penelitian, digunakan Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman [13] yaitu dengan pengumpulan data (data collection), mereduksi data (data reduction) yang didapat dilapangan dalam beberapa tahapan yaitu dengan memilah dan memfokuskan pada tujuan penelitian. Kemudian penyajian data (data display) dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk mendorong perubahan struktur masyarakat dengan memperkuat posisi dan peran perekonomian nasional. Penguatan ekonomi nasional merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kemandiriannya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat, penulis menggunakan teori pemberdayaan ekonomi menurut Abdul Basith 2012 yang menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi yaitu *Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*.

3.1 *Authority* (Kewenangan/otoritas)

Dalam indikator otoritas atau kewenangan Menurut Abdul Basith 2012 *authority* adalah suatu kelompok atau masyarakat yang diberdayakan untuk mengubah sikap atau pola pikir (etos kerja) menjadi milik mereka sendiri (pribadi). Salah satu aspek dimensi kewenangan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat. Kewenangan ini mengacu pada hak untuk mengeluarkan suatu perintah dan mengharapkan agar perintah itu dipatuhi. Adanya otoritas/wewenang mempengaruhi bentuk parameter baik buruknya kebijakan yang dilaksanakan. Dari temuan observasi hingga wawancara yang dilakukan peneliti, untuk mengetahui bagaimana dimensi kewenangan beroperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Permodalan Badan Keswadayaan Masyarakat. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bpk Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

“Otoritas atau wewenang menyangkut legalitas BKM atau legal formal BKM didirikan dari Pemerintah melalui program PNPM Mandiri. Pemerintah mempunyai program tersebut yang diberikan ke Desa untuk dibentuknya BKM. Mengenai pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Kajeksan dimulai di tingkat desa dengan kegiatan sosialisasi di balai desa. Tanpa instruksi langsung, seluruh masyarakat desa menyatakan kesediaannya untuk mendukung program PNPM atau sekarang disebut KOTAKU di desa tersebut. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh desa, RT, tokoh pemuda dan seluruh komponen masyarakat Desa Kajeksan. Untuk memberdayakan ekonomi lewat Badan Keswadayaan Masyarakat, ketua BKM memberi wewenang kepada masyarakat untuk merubah pola pikir serta kehidupannya menjadi lebih baik melalui program-program yang ada di BKM. Salah satunya adalah program simpanan bergulir. Wewenang tersebut diberikan oleh ketua BKM kepada anggotanya untuk membantu menjalankan program yang akan mensejahterahkan masyarakat. Adanya program simpanan bergulir ini diharapkan bisa membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya melalui program tersebut untuk modal usaha, membayar kuliah, dll.” (Wawancara 6 Juni 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap program baik di tingkat desa maupun kota memiliki kewenangan. Karena wewenang itu sendiri adalah bagian dari eksekusi program. dalam wewenang BKM ada beberapa aspek untuk menjalankannya. Badan ini dibentuk untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman bergulir BKM Maju Makmur.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan ekonomi menurut Abdul Basith 2012 sebagaimana otoritas/wewenang sudah digunakan sesuai dengan standar fungsional. Terbukti, dengan adanya kekuatan pemimpin BKM Maju Makmur Desa Tulangan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk maju dan menjadi masyarakat yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Adanya wewenang yang dijalankan oleh ketua BKM dalam pemberdayaan ekonomi agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan.

3.2 *Confidence and competence* (Percaya diri dan kompetensi)

Menurut Abdul Basith 2012, membangun kepercayaan dan menyadari kemampuan mereka untuk mengubah keadaan. Percaya diri merupakan kemampuan seseorang untuk menghargai dirinya sendiri sehingga dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dan Jika melakukan pekerjaan dengan benar maka akan memperoleh keuntungan melalui pengetahuan, keahlian dan sikap [14]. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat untuk membangun perekonomian lewat program permodalan langkah pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia dilakukan pelatihan bagi pengurus BKM dan kelompok swadaya masyarakat. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh pengurus masyarakat dalam membantu program pinjaman bergulir untuk meningkatkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Dalam langkah membangun masyarakat atau merubah kehidupan masyarakat, pengurus BKM lebih dulu melakukan pelatihan tiap tahunnya. Dalam menjalankan program pinjaman bergulir ini ketua BKM membentuk kelompok swadaya masyarakat di tiap RT dan itupun di lakukan pelatihan juga oleh pihak BKM. Setelah itu kelompok swadaya masyarakat mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka bisa terarahkan dalam membangun kompetensinya. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi, dorongan serta bisa mengetahui potensi yang dimiliki setiap masyarakat. Langkah pertama yakni lebih ke membangun percaya diri dulu. Masyarakat biasanya tidak percaya diri dalam mengembangkan potensinya. Nah, dilakukan sosialisasi tersebut bisa mendorong kepercayaan dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Membangun kompetensi dan percaya diri tidaklah mudah mbak, tapi sejauh ini Sebagian masyarakat sudah memngembangkan kemampuannya lewat membuka usaha dengan modal yang didapat melalui program pinjaman bergulir”. (Wawancara 6 Juni 2023).

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat, langkah awal yakni dilakukan pelatihan kepada pihak BKM dan Kelompok swadaya masyarakat yang bertempat ditiap RT yang selanjutnya di adakan pelatihan untuk masyarakat. Dalam hal ini terbukti bahwa pihak BKM dibantu oleh kelompok swadaya masyarakat dalam membangun kompetensi dan percaya diri sudah berhasil meskipun Sebagian masyarakat masih ada yang belum mengembangkan kemampuannya dan bergantung. Hal ini Sesuai dengan indikator percaya diri dan kompetensi yang di ungkapkan menurut teori Abdul Basith 2012 yakni untuk membangun kepercayaan dan menyadari kemampuan mereka untuk mengubah keadaan.

3.3 *Trust* (Kepercayaan)

Menurut Abdul Basith 2012, kepercayaan Yaitu mengarah pada keyakinan bahwa mereka memiliki perintah (kepercayaan) untuk berubah, sehingga termotivasi sebanyak mungkin. Kepercayaan sendiri merupakan percaya bahwa akan menemukan apa yang di inginkan dalam mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu karena percaya bahwa pasangannya akan memberikan apa yang mereka harapkan, dan harapan yang dimiliki seseorang bahwa janji atau pernyataan yang dibuat orang lain dapat dipercaya [15]. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Untuk kepercayaan sendiri mbak, BKM Maju Makmur memberikan kepercayaan langsung kepada masyarakat untuk meminjam uang kepada BKM melalui pinjaman bergulir. kepercayaan diberikan untuk membantu masyarakat keluar dari keterbelakangan. Selain kepercayaan kepada masyarakat, juga harus diperhatikan kepercayaan kepada pimpinan kolektif dan Koordinator BKM selaku aktor dalam menjalankan program tersebut. Karena untuk pengurus saat ini orang-orangnya punya tanggung jawab masing-masing. Dari awal di bentuk BKM ini, koordinator yang paling lama masa kepemimpinannya yaitu Bapak Hari dan 9 anggotanya. Karena dalam menjalankan program tersebut sudah dipercaya oleh masyarakat serta berjalan hingga saat ini terutama bidang ekonomi yang masih berjalan”. (Wawancara 6 Juni 2023).

Tidak dipungkiri, hal pertama yang harus dicari saat menjalankan program adalah kepercayaan. Meskipun sebagian masyarakat terkadang menganggap amanah sebagai sesuatu yang biasa, namun hal tersebut perlu diperhatikan dalam membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah, pelaksana BKM dan masyarakat saling percaya, program dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Jika fenomena diatas dikaitkan dengan teori pemberdayaan ekonomi menurut Abdul Basit 2012 sebagaimana kepercayaan sudah di jalankan dengan baik. Terbukti masyarakat sudah sangat percaya kepada pemimpin saat ini. Ditemui dilapangan bahwa pemimpin saat ini masa jabatannya sudah sangat lama. Dalam hal ini, program tersebut sudah bisa membantu dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat.

3.4 Opportunity (Peluang)

Menurut Abdul Basith 2012, opportunity (peluang) yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan potensinya apa yang ingin dikembangkannya sendiri. Peluang sendiri merupakan kesempatan yang dimiliki oleh semua orang untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik melalui kreatifitas dalam dirinya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomian, baik melalui program pemberdayaan masyarakat maupun lewat perbaikan diri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh peluang yang diciptakan oleh Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dan masyarakat itu sendiri. Ini adalah dasar terpenting untuk pengembangan masyarakat di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Jadi sebagai peluang untuk memberdayakan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk modal usaha, bayar kredit, bayar listrik, beli pulsa, dll. terkadang masyarakat hutang dulu ke BKM baru kalau udah ada uang dibayar sesuai dengan perjanjian. Kami sebagai pihak yang mengatur berjalan atau tidaknya program BKM sangat terbuka sekali untuk memberikan peluang lewat pinjaman bergulir ini. Karena masyarakat itu merasa terbantu adanya peluang tersebut. masyarakat juga bebas meminjam uang tanpa ditentukan nominalnya. Saat ini adanya peluang tersebut masyarakat bisa membuka usaha atau bisa terbantu perekonomiannya lewat pinjaman bergulir dan masyarakat mulai meninggalkan bank cicilan”. (Wawancara 6 Juni 2023).

Setelah wawancara ekstensif tentang BKM Maju Makmur untuk memberdayakan ekonomi jika dikaitkan dengan indikator pemberdayaan ekonomi menurut Abdul Basith 2012 mengenai peluang sudah berjalan. Dibuktikan dengan masyarakat diberi peluang untuk meminjam uang sebagai modal usaha. Karena kesempatan tersebut, masyarakat sangat antusias untuk bergabung dengan BKM Maju Makmur. Mereka tidak lagi meminjam uang dari bank cicilan, yang bunganya sangat tinggi, dan ada jaminan. Ketika Meminjam dari BKM juga memberikan kebebasan nominal kepada masyarakat, jaminan tergantung jumlah nominal yang dipinjam, mengingat untuk memulai usaha membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adanya peluang tersebut dapat mengangkat masyarakat dari kemiskinan terbukti dengan masyarakat yang telah membuka usaha sendiri seperti usaha pengisian air galon, model, gorengan, usaha warkop dll. Tidak hanya itu, masyarakat juga memiliki peluang meminjam uang untuk membayar biaya sekolah, biaya pengobatan, pembangunan rumah dan kebutuhan mendesak lainnya.

3.5 Responsibility (Tanggung jawab)

Menurut Abdul Basith 2012, Responsibility yaitu untuk mengimplementasikan proses perubahan, harus melalui tahapan manajemen yang bertanggung jawab untuk perubahan yang lebih baik. Tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana menanggapi situasi sehari-hari yang membutuhkan keputusan moral [16].

Tanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui permodalan badan keswadayaan masyarakat desa Kajeksan terletak pada tanggung jawab koordinator BKM atas pelaksanaan program tersebut. Seperti tanggung jawab yang dilihat dalam pengelolaan dana pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Dilihat dari masyarakat yang meminjam dana dari BKM Maju Makmur, mereka juga harus diberikan tanggung jawab untuk membayar setiap bulannya karena jika banyak masyarakat yang tidak mengembalikan maka dana tersebut tidak akan berjalan dan macet untuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“BKM pada dasarnya mengelola dana masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola dan dipertanggung jawabkan. Setiap akhir tahun kita sampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan seperti laba, uang pinjaman macet, uang bergulir akumulasinya juga di pertanggung jawabkan. Nah untuk uang yang macet ini ditutupi dengan laba yang didapat diakhir tahun supaya pinjaman bergulir ini dikatakan sehat. Kalau pertanggung jawaban masyarakat itu, Ketika meminjam ke BKM harus diangsur tiap bulannya. Tapi masyarakat ini masih ada yang tidak bertanggung jawab misal pinjam uang sekian kemudian diangsur dua kali lalu ga diteruskan. Adanya permasalahan itu untuk saat ini Koordinator BKM mengeluarkan peraturan Ketika masyarakat pinjam uang di BKM baik jumlah sedikit maupun banyak ada jaminannya yaitu BPKB.” (Wawancara 7 Juni 2023).

Dari hasil wawancara jika dikaitkan dengan indikator menurut Abdul Basith 2012 mengenai tanggung jawab dalam hal ini masih ditemui dilapangan bahwa adanya Sebagian masyarakat tidak mengangsur pinjaman dari BKM yang mengakibatkan pihak BKM harus menutupi kekurangannya untuk dipertanggung jawabkan di akhir tahun. Tetapi

untuk koordinator dan tim pelaksananya sudah sangat berhasil dalam mempertanggung jawabkan uang yang dikelola untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Terbukti bahwa setiap tahunnya mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menunjukkan hasil pengelolaan uang BKM. Dengan pihak pengelola BKM maupun masyarakat yang saling bertanggung jawab yang merujuk pada misi dan tujuan kebijakan bahwa dapat dipastikan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif dan tercapai sesuai tujuan.

3.6 Support (Dukungan)

Menurut Abdul Basith 2012, support yaitu perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaikinya. Dalam hal ini, dukungan yang diharapkan tidak hanya dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) yang dilaksanakan secara bersamaan tanpa ada satu pihak/faktor yang mendominasi.

Upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan antara lain dengan dibentuknya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) atau sekarang program KOTAKU, yang memberdayakan masyarakat miskin melalui aksi masyarakat yang melibatkan pemerintah dan swasta dalam kegiatan mandiri dan berkelanjutan. Untuk mengelola program ini, pemerintah tingkat Kelurahan melalui musyawarah membentuk badan kemasyarakatan yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah unit masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan status pimpinan kolektif setingkat desa/keluhan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif untuk mendekatkan program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada pihak yang membutuhkan. BKM bertujuan khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan umumnya untuk membangun masyarakat desa. Membangun program penanggulangan kemiskinan tingkat Kelurahan/desa membutuhkan sinergi dan dukungan yang tidak mudah untuk merubah karena keterbelakangan masyarakat. Peran Pemerintah Desa, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua BKM sangat penting dilakukan untuk membantu mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet Wibisono selaku Kepala Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya program BKM karena program ini bernilai positif. Apalagi program ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan perekonomian. Anggota RT, tokoh masyarakat pun juga sangat antusias mendukung program tersebut. karena di masyarakat Kajeksan ini banyak yang bekerja di sektor pertanian, pendapatan juga tidak menentu, maka untuk memenuhi kebutuhan yang kurang biasanya masyarakat pinjam uang di BKM yang ada di desa ini.” (Wawancara 7 Juni 2023).

Penjelasan pernyataan dari Bapak Slamet Wibisono lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Bapak Suprpto, S. Pd selaku Pimpinan Kolektif di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

“Untuk Kepala Desa ini sangat mendukung adanya program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantuk masyarakat desa agar lebih sejahtera. Tidak hanya kepala desanya saja, perangkat desa, RT, serta masyarakatnya sendiri pun juga sangat mendukung program tersebut. karena mereka bisa memanfaatkan program ini untuk memulai usaha, memenuhi kebutuhan dan lainnya dengan proses yang mudah tanpa pinjam ke bank. Jadi kita sama-sama mendukung hingga program ini bisa berjalan sampai detik ini.” (Wawancara 7 Juni 2023).

Dukungan merupakan aspek yang sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat melalui program pinjaman bergulir. Sesuai dengan pernyataan bahwa baik Pemerintah desa, RT, serta masyarakatnya sangat mendukung program tersebut sesuai dengan indikator support (dukungan) menurut Abdul Basith 2012. Tanpa dukungan dari beberapa pihak maka program pinjaman bergulir tidak akan berjalan. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya kata semangat tetapi diperlukan masukan-masukan yang membangun agar bisa menjadikan BKM Maju Makmur berjalan dan berkembang menjadi lebih baik. Adanya pinjaman bergulir di BKM Maju Makmur sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mengubah kehidupan menjadi lebih baik dengan mengikuti program tersebut.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan ditinjau dari 6 aspek yakni sebagai berikut:: Pertama, authority (otoritas/wewenang) selama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program permodalan badan keswadayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan apapun. Dalam hal ini terbukti bahwa di BKM Maju Makmur desa Kajeksan berjalan sesuai dengan wewenang serta arahan dari Koordinator BKM. Wewenang ini sangat dibutuhkan dalam memberdayakan masyarakat agar mereka tidak menyalah gunakan program pinjaman bergulir. Kedua adalah confidence and competence (percaya diri dan kompetensi), dalam hal ini, untuk membangun kompetensi dan percaya diri masyarakat, ketua BKM beserta anggotanya dilakukan melalui pelatihan. Meskipun masih ada masyarakat yang tidak bisa percaya diri dalam menjalankan kemampuan yang dimiliki, tetapi adanya pelatihan ini yang dilakukan oleh pihak BKM kepada masyarakat Sebagian masyarakat bisa merubah keadaan dengan mengikuti program yang ada di BKM seperti pinjaman bergulir. Dimana program ini bisa membantu masyarakat untuk menjalankan kemampuan yang dimiliki dengan modal yang didapat dari BKM Maju Makmur seperti masyarakat bisa membuka usaha. Ketiga adalah trust (kepercayaan) secara umum kepercayaan dalam pemberdayaan ekonomi melalui program permodalan badan keswadayaan masyarakat sudah optimal. Untuk mengelola uang di BKM sangat dibutuhkan kepercayaan kepada pemimpin maupun pelaksanaannya. Terbukti bahwa masyarakat sangat percaya kepada pemimpin tersebut karena bisa mengelola program pinjaman bergulir hingga saat ini. Keempat yaitu opportunity (peluang) di BKM Maju Makmur Desa Kajeksan sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminjam uang melalui pinjaman bergulir. Masyarakat tidak lagi meminjam di bank cicilan karena di BKM ini membuka kesempatan untuk meminjam uang tanpa ada batas nominalnya atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelima, responsibility (tanggung jawab) dalam hal ini, pihak BKM Maju Makmur sudah bertanggung jawab mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditentukan. Tetapi untuk masyarakatnya sendiri Ketika meminjam uang di BKM masih ada beberapa yang belum mengangsur tiap bulannya yang akan berakibat macet. Keenam adalah support (mendukung), pemerintah desa, RT, serta masyarakatnya sendiri sangat mendukung program yang dijalankan oleh BKM Maju Makmur salah satunya yaitu pinjaman begulir. adanya program pinjaman bergulir di BKM Maju Makmur desa Kajekan sangat membantu masyarakat yang kekurangan dalam ekonominya. Adanya dukungan ini sangat membantu masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Dari keseluruhan hasil penarikan kesimpulan, bahwa peneliti merekomendasikan kepada Koordinator BKM Maju Makmur Desa Kajeksan agar lebih memerhatikan masyarakat yang meminjam uang tetapi diangsur Cuma beberapa kali agar tidak berdampak pada masyarakat yang lain. Mungkin dalam melakukan pertemuan tiap akhir tahunnya di sampaikan juga kepada masyarakat yang terlibat dalam pinjaman bergulir ini agar lebih baik lagi cara mengangsurnya dan tidak menunggak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Bhinadi, “Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Deepublish*, p. 9, 2017.
- [2] B. Rustanto, “Mengenal Kemiskinan,” in *n Bandung : PT. Remaja Rosdakara*, 2015, p. 2.
- [3] S. Usman, “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,” in *Yogyakarta : Pustaka Pelajar*, 1998, pp. 30–31.
- [4] O. M. Anwas, “Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global,” in *Bandung : Alfabeta*, 2013, p. 83.
- [5] I. N. Sumaryadi, “Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat,” in *Jakarta: Penerbit Citra Utama*, 2005, p. 1.
- [6] M. A. dkk. Aziz, “Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi,” in *Yogyakarta. LKiS Pelangi Nusantara*, 2005, p. 169.
- [7] M. S. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto and M. S. Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiato, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK,” in *Alfabeta, Bandung*, 2019, p. 52.
- [8] A. Basith, “Ekonomi Kemasyarakatan,” in *Malang, UIN-PRESS MALANG*, 2012.
- [9] A. Sri Entang, A. Bachrun Rifa, dan Ali Azis Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, F. Dakwah dan Komunikasi, and U. Sunan Gunung Djati, “Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” Dipublikasikan: Juni, 2018. [Online]. Available: <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>
- [10] N. FARDA, “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja ...” pp. 1–125, 2021, [Online]. Available: <https://repository.uinsaizu.ac.id/11436/1/SKRIPSI FARDA.pdf>
- [11] S. Iskandar, A. D. A. Rani, and ..., “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Labuhan Sumbawa,” *J. Kapita Sel. ...*, no. September 2020, pp. 149–155, 2022, [Online]. Available: <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/view/911%0Ahttps://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap/article/download/911/884>
- [12] W. Riyadi *et al.*, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Revitalisasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Cicurug,” vol. 2, no. 4, pp. 343–347, 2023.
- [13] IRWAN, “Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal,” in *Yogyakarta: Deepublish*, 2015. [Online]. Available: <https://sarifudin.com/020001/karya-tulis-ilmiah/47-ki0401/179-bagaimana-membuat-analisis-data-analisis-data-dapat-dilakukan-secara-interaktif>
- [14] D. Edison, “Manajemen Sumber Daya Manusia,” in *Bandung : ALFABETA*, 2016.
- [15] J. G. Barnes, “Secret of Customer Relationship Management (Rahasia Manajemen Hubungan Pelanggan),” in *Yogyakarta: Andi*, 2003.
- [16] & B. T. Schiller, P., “The value Book for Children: 16 Moral Dasar Bagi Anak Disertai Kegiatan yang Bisa Dilakukan Orang Tua Bersama Anak,” in *Jakarta: Elex Media Komputindo*, 2002.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.